

OPINI

UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN DI INDONESIA

Azriel Ivansyah Utama¹⁾, Ikomatussuniah²⁾

Email: 1111230027@untirta.ac.id¹⁾, iko@untirta.ac.id²⁾

¹⁾Mahasiswa Ilmu Hukum UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Serang

²⁾Dosen Ilmu Hukum UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Serang

Ketahanan adalah tentang kemampuan beradaptasi, tentang bagaimana menjadi fleksibel, sedangkan pengertian pangan menurut salah seorang ahli adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari tumbuhan ataupun hewan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk menambah energi dan nutrisi. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks yang mencakup beberapa aspek seperti sosial, politik, dan lingkungan. Ketahanan pangan merupakan wujud dari usaha dan cita-cita manusia agar produksi pangan di dunia ini tetap stabil dengan berbagai permasalahannya, oleh karena itu regulasi atau kebijakannya harus benar-benar tepat, karena pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia selain dari pada sandang dan papan untuk dapat mempertahankan hidup, maka dari itu kecukupan pangan bagi setiap individu setiap waktu merupakan hak azasi yang harus terpenuhi. Di Indonesia bahkan dunia kebutuhan pangan terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Bertambahnya penduduk menjadi permasalahan dan bukan satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional yang paten. Lahan pertanian yang semakin berkurang, di jadikan pemukiman dan industri, menjadi ancaman dan tantangan tersendiri untuk bangsa Indonesia agar bisa sampai pada tujuan yaitu menjadi negara yang mandiri dalam bidang pangan. Sekalipun saat ini Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, namun ketahanan pangan masih menjadi salah satu

prioritas dalam pembangunan nasional. Sebagai kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa di substitusi atau di gantikan dengan bahan lain. Sementara, jumlah penduduk Indonesia tidak berhenti meningkat, pastinya memerlukan penyediaan bahan pangan dengan jumlah yang sangat besar. Kapasitas penyediaan bahan pangan justru menghadapi sejumlah tantangan seperti kompetisi pemanfaatan sumber daya lahan dan air untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian, perubahan iklim global, serta degradasi lingkungan yang menurunkan kapasitas produksi pangan nasional. Kita juga menghadap persoalan penanganan kerawanan pangan masih terjadi di Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih agar meningkatkan kemandirian pangan di indonesia? Solusinya adalah diversifikasi pangan, penggalakan pangan dan mengembangkan kearifan dan potensi komoditas lokal. Ada 4 macam penggunaan teknologi upaya mewujudkan kemandirian pangan untuk di produksi yaitu:

1. **Smart Precision Farming:** teknologi ini menggunakan drone, sensor, dan data analistik untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara real-time. Hal ini membantu para petani untuk mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, serta mengendalikan hama dan penyakit.
2. **Teknologi Irigasi:** seperti irigasi tetes dan fertigasi, dapat membantu menghemat air dan meningkatkan hasil panen.
3. **Benih Unggul:** Benih unggul yang tahan hama, penyakit, dan kekeringan dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman.
4. **Teknologi Bioteknologi:** dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap stres lingkungan dan memiliki hasil panen yang lebih tinggi.

Penerapan Teknologi ketahanan pangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri bahan dasar pokok masih banyak sekali impor dari luar negeri dan impor pangan pokok hanya dilakukan ketika produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat solusinya kita harus meningkatkan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah upaya untuk masyarakat

agar memvariasi produk makanan yang telah mereka buat, tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, menjamin ketersediaan pangan secara mandiri, serta menjamin asupan gizi. Beras analog merupakan salah satu bentuk diversifikasi pangan yang merupakan pengganti beras. Beras analog dihasilkan dari adonan tepung pangan lokal yang dimasukkan ke mesin pencetak sehingga menghasilkan pangan yang menyerupai beras. Beras analog juga merupakan pengalihan “*mindset*” makan itu harus nasi. Bahan dasar beras analog juga merupakan dari pembuatan mie instan. Pendidikan memiliki peran yang cukup vital untuk menjamin kesinambungan pola konsumsi pangan beragam. Melalui pendidikan, penanaman konsepsi yang benar mengenai pangan dan pentingnya keanekaragaman konsumsi pangan dari segi kesehatan maupun isu ketahanan pangan. Sesuai arahan UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, dan UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan sasaran diatas, maka arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemantapan ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi bahan pokok, harga pangan terjangkau, dan terjaminnya bahan pangan yang aman, berkualitas, dan bergizi yang meningkat serta untuk kesejahteraan pelaku usaha terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Kemandirian pangan nasional tidak dapat terwujud apabila pulau-pulau kecil kekurangan ekonomi dan produksi apabila dua kriteria tersebut sudah mencukupi kemandirian pangan bisa terwujud. Tujuan kemandirian pangan pulau-pulau kecil agar setiap pulau memenuhi kebutuhannya sendiri terutama untuk pangan pokoknya sesuai dengan potensi dan kebudayaannya. Oleh karena itu produksi dan konsumsi harus sesuai dengan agroekosistem pulau tersebut. Sebagai contoh di Maluku Utara dapat meningkatkan konsumsi terhadap ubi kayu, pisang, maupun sukun yang nilai kalorinya tidak kalah juga dengan padi juga tersedia melimpah di Maluku Utara, Jika konsumsi terhadap beras turun dan konsumsi terhadap ubi kayu, pisang, dan sukun naik, maka standar PPH di Maluku Utara juga dapat berubah. Standar PPH dari kementerian kesehatan sebaiknya tidak dilakukan seragam, harus menghitung ketersediaan kalori serta pola konsumsi di wilayah secara spesifik. Maluku juga berprinsip kedaulatan pangan pada prioritas keluarga miskin dan kekurangan pangan, mengembangkan kearifan lokal pangan, serta mempertahankan pola konsumsi sesuai budaya setempat.

Berdasarkan UU No 18 tahun 2012 upaya mewujudkan ketersediaan pangan dapat dilakukan melalui pengembangan pangan lokal, dan pemerintah daerah menetapkan pangan lokalnya (Pasal 12 ayat 3). Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan dalam negeri sebagai berikut:

1. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
2. Meningkatkan efisiensi sistem usaha pangan.
3. Mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan.
4. Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan
5. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif dan
6. Membangun sentra produksi pangan (Pasal 12 ayat 5).

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyati, S., Eris, F. R., Putri, N. A., Pamela, V. Y., Wulandari, P., Nurtiana, W., . . . Ardie, R. (2020). *KETAHANAN PANGAN*. SERANG: Untirta Press anggota APPTI bekerja sama dengan IDB.
- Susanto, A. N., Ramijah, K. E., & Siregar, I. H. (2017). ANALISIS KEMANDIRIAN PANGAN SUMBER KARBOHIDRAT DI PROVINSI MALUKU UTARA. *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara*, 424-430.
- Sutrisno, A. D., Cahyadi, W., Taufik, Y., & Sumartini. (2022). *KETAHANAN PANGAN*. BANDUNG: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI.

